

HOMOGENITAS VERSUS MULTIKULTURALISME: PERDEBATAN PENERIMAAN PEKERJA ASING DI JEPANG

Oleh:
Edy Hariyadi

Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra, Universitas Jember
Jl. Kalimantan 37 Jember, 68121

Abstract

This article describes the rivalry of homogeneity and multiculturalism conceptions in the debate on acceptance of foreign workers, including from Muslim world, in Japan. National debate in Japan spawned two opposing groups, i.e. *sakoku* group (who reject foreign workers) and *kaikoku* group (who receive foreign workers). On behalf of the control and power, Japan's political elites disseminate a conception that Japanese people are a homogenous or monoculture society. Today, the homogeneity conception is faced with multiculturalism conception that is spreaded out in Japanese society in order to help Japanese society in understanding for accepting foreign workers which has increasingly needed by Japan industry. Various industrial sectors in Japan needs many foreign workers to be employed in low-wage work sectors that are called 3Ks, i.e.: *kitanai* (dirty), *kiken* (dangerous), and *kitsui* (hard). While Japanese society is still widely in monoculturalism conception, to facilitate community in accepting foreign workers with various cultures and religions, they need a new conception, i.e. multiculturalism.

Keywords: multiculturalism, homogeneity, foreign muslim and non muslim workers, Japanese society.

Abstrak

Artikel ini menjabarkan pertentangan antara konsepsi homogenitas dan multikulturalisme dalam konteks perdebatan penerimaan pekerja asing, terutama yang berasal dari Dunia Islam di Asia dan Afrika, di Jepang. Perdebatan secara nasional di Jepang melahirkan dua kelompok yang berseberangan yaitu kelompok *sakoku* (yang menolak pekerja asing) dan *kaikoku* (yang menerima pekerja asing). Demi kontrol dan kekuasaan, para pemimpin Jepang menyebarkan konsepsi bahwa masyarakat Jepang adalah masyarakat yang homogen atau monokultur. Namun, dewasa ini konsepsi homogenitas dihadapkan dengan konsepsi multikulturalisme yang disebarluaskan dalam masyarakat Jepang dengan tujuan untuk membantu kesepahaman masyarakat dalam penerimaan pekerja asing dengan beragam kultur, termasuk para pekerja dari negara-negara di Dunia Islam. Sektor industri di Jepang membutuhkan pekerja asing dengan gaji rendah untuk

dipekerjakan pada sektor-sektor yang ditinggalkan atau dihindari oleh para pekerja Jepang, yaitu sektor kerja yang disebut 3K; *kitanai* 'kotor', *kiken* 'bahaya'), dan *kitsui* 'susah'. Pandangan multikulturalisme amat diperlukan untuk membuat masyarakat Jepang lebih menerima pekerja asing dengan beragam latar belakang budaya dan agamanya.

Kata kunci: homogenitas, multikulturalisme, pekerja asing muslim-non muslim, masyarakat Jepang.

A. PENDAHULUAN

Bangsa Jepang selama ini dipandang sebagai masyarakat monokultur atau homogen sebagaimana yang dikonsepsikan oleh *Nihonjinron*.¹ Dalam konsepsi *nihonjinron*, masyarakat Jepang adalah homogen (*tan'itsu minzoku*), yang membentuk sebuah bangsa yang secara ras sama (*tan'itsu minzoku kokka*). Hal ini berbeda dengan bangsa Indonesia yang terdiri atas bermacam-macam suku bangsa, bahasa daerah dan kebudayaannya, atau bangsa Amerika yang merupakan *melting pot*, wadah peleburan berbagai bangsa dan budaya, baik bangsa kulit putih Eropa, kulit hitam Afrika, Puerto Rico, Meksiko, bangsa kulit berwarna Asia, suku Indian maupun bangsa Amerika Latin lainnya.

Dewasa ini, konsepsi homogenitas bangsa Jepang yang selama ini telah diakui secara luas dihadapkan pada kenyataan "multikulturalisme" Jepang terutama sebagai pekerja asing di dunia industri. Tulisan ini membahas tentang bagaimana perdebatan antara gagasan multikulturalisme *versus* homogenitas bangsa Jepang dalam konteks penerimaan pekerja asing dari berbagai negara di dunia, termasuk Dunia Islam, di Jepang ini berlangsung?.

B. HOMOGENITAS BANGSA JEPANG

Homogenitas, menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah persamaan macam, jenis, sifat, watak dari anggota suatu kelompok;

¹ *Nihonjinron* adalah sebuah genre tulisan yang mengangkat keunikan kebudayaan Jepang. Mouer dan Sugimoto mengatakan bahwa *Nihonjinron* memiliki dua paham utama yaitu: masyarakat Jepang memiliki 'keunikan' yang unik dan orientasi masyarakat Jepang adalah pada kelompok. Orientasi kelompok ini kemudian menjadi pola kebudayaan dominan yang membentuk perilaku orang Jepang. Chris Burgess, *Jepang yang multikultur? Wacana dan Mitos Homogenitas*, (Diakses pada tanggal 23 April 2011 dari http://japanfocus.org/data/indo_multiculturaljapan.pdf. hlm. 406.

keadaan atau sifat homogen; kehomogenan.² Di Jepang, penyebaran konsepsi kehomogenitasan bangsa Jepang melibatkan tokoh-tokoh terkemuka Jepang mulai abad ke-18 sampai abad ke-20. Lapisan masyarakat mulai dari para sarjana *Kokugakusha* ('National Learning') hingga Perdana Menteri Nakasone Yasuhiro (pada tahun 1980-an) berpendapat bahwa Jepang adalah sebuah masyarakat yang secara alamiah bersifat homogen, karena: (1) tidak seperti Amerika Serikat yang dibentuk berdasarkan kontrak atau kesepakatan; (2) ras Yamato telah hidup di Jepang setidaknya 2000 tahun tanpa ada suku bangsa lainnya; (3) letak geografis Jepang yang dipisahkan oleh laut, berada di ujung timur benua Eurasia.³ Selengkapnya pernyataan-pernyataan para elit politik di Jepang mengenai kehomogenan masyarakat Jepang termaktub dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Pernyataan Para Elit Politik Jepang mengenai *Tan'itsu Minzoku* (Masyarakat Homogen)⁴

Tahun	Nama (Posisi)	Pernyataan
1986	Nakasone Yasuhiro (Perdana Menteri)	"Oleh karena Jepang adalah sebuah <i>tan'itsu minzoku</i> , maka ia dapat meraih standar pendidikan tinggi, tidak seperti Amerika yang sulit meraihnya karena merupakan masyarakat yang multikultural."
1988	Nakajima Gentaro (Menteri Pendidikan)	"Benar seperti yang dikatakan dalam buku pelajaran bahwa (Jepang) dibentuk oleh ras Yamato. Menurutnya Jepang lebih (<i>hobo</i>) sebagai sebuah <i>tan'itsu minzoku</i> ."
1995	Yamazaki Taku (Direktur Jenderal Defence Agency)	"Fakta bahwa Jepang adalah sebuah negara satu ras, satu bangsa, dan satu bahasa telah membuat Jepang kuat. Hal ini terlihat dalam konsiderasi yang ditunjukkan orang Jepang terhadap orang Jepang lainnya selama pemulihan bencana gempa Great Hanshin."

² Pusat Bahasa Diknas RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Offline Versi 1.1*.

³ Donald Denoon dan Mark Hudson (ed.), *Multicultural Japan Palaeolithic to Postmodern*, (New York: Cambridge University Press, 2001), hlm. 1.

⁴ Chris Burgess "The 'Illusion' of Homogeneous Japan and National Character: Discourse as a Tool to Transcend the 'Myth' vs. 'Reality' Binary". Diakses pada tanggal 23 April 2011 dari <http://japanfocus.org/-Chris-Burgess/3310>.

2001	Suzuki Muneo (Anggota Parlemen/ Diet)	"Tidak ada negara lain seperti Jepang dengan tingkat <i>tan'itsu minzoku</i> -nya yang tinggi."
2001	Tanaka Makiko (Menteri Luar Negeri)	"Jepang adalah sebuah <i>tan'itsu minzoku</i> ."
2005	Aso Taro (Menteri Dalam Negeri dan Telekomunikasi)	"Jepang, sebuah negara dengan satu budaya, satu peradaban, satu ras, dan satu bahasa, sebuah negara yang tiada yang menyamainya."
2007	Ibuki Bunmei (Menteri Pendidikan)	"Bahwa ras Yamato telah memerintah Jepang adalah fakta sejarah. Sebuah negara homogen karena sejak lama orang Jepang mengatur negerinya sendiri."

Dari tabel di atas, dapat dipahami bahwa dari tahun ke tahun para pejabat pemerintah dan elit politik Jepang menyebarkan konsepsi kehomogenitasan bangsa Jepang. Menurut mereka, bangsa Jepang adalah bangsa yang homogen; satu ras, satu bahasa, satu bangsa, satu budaya, dan satu peradaban. Namun, apakah benar bangsa Jepang benar-benar homogen secara ras? Apakah benar negara Jepang adalah negara dengan satu peradaban dan satu bahasa?

Dalam wacana kontemporer *Japaneseness (Nihonjinron)*, Jepang sering dicirikan sebagai masyarakat kelas menengah, masyarakat tanpa kelas, dan egaliter. Survei menunjukkan bahwa 90% orang dewasa Jepang menempatkan diri dalam strata menengah (*chuu kaisoo*). Reaksi publik Jepang terhadap para pekerja asing: mereka selalu dipandang sebagai orang-orang yang kurang berpendidikan dan statusnya lebih rendah. Seorang *sarariiman* (karyawan) paruh baya berpendapat bahwa masuknya para pekerja imigran dari kultur yang beragam akan menghancurkan Jepang sebagai sebuah "masyarakat tanpa kelas."

Akan tetapi, fakta sejarah menunjukkan adanya realitas ketimpangan di masa lalu yang bertentangan dengan asumsi Jepang sebagai masyarakat kelas menengah. Pada era pemerintahan *shogun* Tokugawa, misalnya, diberlakukan politik pintu tertutup (*sakoku*). Dalam periode Tokugawa ini, hirarki status sangat kaku: *shinokosho* (yang terdiri dari kelas samurai, petani, pengrajin, pedagang). Perpindahan status sosial dan perkawinan antar status pada masa itu sangat sulit terjadi. Pada masa itu, jati diri bangsa Jepang terbentuk dengan matang tanpa adanya intervensi dari luar, dan hal ini

didukung juga dengan sistem pemerintahan feodal yang kuat. Pemberlakuan sistem pembagian kelas sosial *shinokosho* membuat setiap orang menjalankan hak dan kewajiban sesuai kedudukannya. Setiap orang juga mempunyai *amae*, yaitu rasa ketergantungan dengan orang lain. Sebelum tahun 1945, ide kehomogenan dan keunggulan bangsa Jepang terkandung dalam kebijakan nasional (*kokutai*). Dalam kebijakan itu, orang Jepang dianggap satu keluarga yang unik yang tinggal di sekitar Kaisar. Setelah kalah dalam Perang Dunia II, jati diri orang Jepang ini tidak disinggung lagi.⁵

Nakane Chie dalam bukunya *Japanese Society*, menggambarkan bangsa Jepang sebagai "masyarakat vertikal" (*tateshakai*) dalam sistem *ie*, dengan melihat hubungan manusia yang bersifat vertikal yang membuat kuatnya hubungan antar manusia dalam satu kelompok besar berupa negara.⁶ Jadi asumsi bahwa Jepang adalah negara yang homogen diperkuat oleh pengaruh sistem feodal dan struktur hirarki masyarakat. Sistem *ie* menjadi titik penting bagi banyak orang untuk memandang Jepang sebagai masyarakat yang unik homogen. Mitos kehomogenan ini ditujukan demi memuaskan golongan elit penguasa yang ingin mempertahankan aturan dan kendali serta mengukuhkan kekuasaan mereka. Keadaan dan sifat nyata bangsa Jepang yang sesungguhnya memiliki kecenderungan multikultur ditutupi dengan rapat oleh ideologi keunikan dan monokulturalisme (homogenitas).⁷

C. MULTIKULTURALISME BANGSA JEPANG

Multikulturalisme mencakup suatu pemahaman, penghargaan dan penilaian atas budaya seseorang, serta penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. Multikultural juga diartikan sebagai keragaman atau perbedaan terhadap suatu kebudayaan dengan kebudayaan lain. Multikulturalisme mengakui setiap entitas kultur termasuk pluralitas agama. Konsepsi bahwa Jepang adalah negara yang homogen atau monokultur tidak sepenuhnya benar. Populasi penduduk Jepang ternyata berasal dari beberapa gelombang imigrasi. Imigrasi awal pada zaman

⁵ Denon, *Multicultural Japan Palaeolithic to Postmodern*, hlm. 2.

⁶ Chie Nakane, *Japanese Society* (California: University of California Press, 1970), hlm. 87.

⁷ Denon, *Multicultural Japan Palaeolithic to Postmodern*, hlm. 3.

Palaelotikum adalah orang proto-Mongoloid (yang kemudian disebut Jomon) dari Asia Tenggara atau Cina Selatan. Pada abad pertengahan, ekspansi Jepang ke Korea menyebabkan banyak orang Korea yang menjadi warga 'Jepang'. Keberadaan orang asing di Jepang turut memperkuat beragamnya budaya Jepang, Mereka tersebar dalam beberapa kategori, misalnya pelajar, pekerja asing, atau warga keturunan, serta orang asing yang menikah dengan orang Jepang.⁸

Bukti keragaman bangsa Jepang adalah adanya kelompok minoritas yang terdiri dari Burakumin, Ainu, warga keturunan Korea, dan para tenaga asing seperti ang tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 2. Karakteristik kelompok minoritas di Jepang⁹

Kelompok	Jumlah Penduduk	Konsentrasi Geografis	Penyebab timbulnya kelompok minoritas
Burakumin	2.000.000	wilayah Kansai	sistem kasta selama masa feodal
penduduk Korea	600.000	wilayah Kansai	penjajahan Jepang di Korea
Ainu	24.000	Hokkaido	penduduk Honshu akibat agresi ke Jepang utara
Pekerja asing	1.300.000	Kota-kota besar	kekurangan tenaga kerja tidak terampil

Jika kita lihat tabel di atas maka dapat kita ketahui bahwa jumlah kaum minoritas di Jepang cukup signifikan dan bervariasi. Klaim tentang kehomogenitasan bangsa Jepang yang telah disebarluaskan oleh para elit politik dan para pemimpin Jepang itu patut dipertanyakan. Jika Jepang merupakan bangsa yang homogen, maka kelompok-kelompok minoritas yang terdiri atas *burakumin*, *resident Koreans*, Ainu, pekerja asing itu seharusnya tidak ada di Jepang. Selain itu, misalnya di Roppongi, daerah yang paling modis di Tokyo, terdapat orang Israel menjajakan perhiasan murah dan orang-orang Iran menjajakan kartu telepon, serta kafe Perancis yang mewah dengan pelayan orang Bangladesh. Selain itu, ada daerah multietnis lainnya

⁸ *Ibid.*, hlm. 2-3.

⁹ Yoshio Sugimoto, *An Introduction to Japanese Society*. Second Edition (New York: Cambridge University Press, 2010), hlm. 192.

seperti Ikano yang merupakan wilayah orang Korea di Osaka dan Chikuhou di Kyuushuu.¹⁰

Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa dalam periode Tokugawa hirarki status sangat kaku *shinokosho* (samurai, petani, pengrajin, pedagang) sehingga perpindahan status dan perkawinan antar status sosial dilarang. Sejak era Restorasi Meiji secara formal diperkenalkan kewarganegaraan Jepang mulai egaliter. Namun, Jepang sampai pada era sebelum Perang Dunia II secara jelas masih membedakan status sosial berdasarkan elit keturunan, yaitu rumah tangga kekaisaran (*koozoku*), bangsawan (*kazoku*), dan mantan samurai (*shizoku*) dan rakyat jelata (*heimin*), serta Burakumin (*shin heimin*). Kaum elit yang mencolok di Jepang sebelum masa perang adalah meritokratis yang ditempa melalui hubungan universitas kekaisaran dan birokrasi pemerintah.¹¹ Meskipun *shizoku* hanya enam persen dari total populasi, mereka mengisi lebih dari setengah dari total jumlah mahasiswa kekaisaran pada awal abad kedua puluh.¹² Hambatan formal untuk perkawinan dan pekerjaan sudah diakhiri, tetapi pembatasan secara informal masih tetap kokoh. Demikian pula, kemiskinan perkotaan dan yang lebih buruk lagi, kemiskinan di pedesaan menyebar di seluruh negeri. Di luar masalah hirarki vertikal sebagai sebuah komponen dari kebudayaan Jepang, ketimpangan sosial adalah fakta yang tak terbantahkan dalam masyarakat Jepang kontemporer.

Dalam rentang waktu lama, *japan dream* adalah masuk ke universitas bergengsi. Tidak ada yang berani mempertanyakan keberadaan hirarki universitas yang menempatkan Universitas Tokyo (*Toodai*) dan Kyoto University berada di puncaknya. Pada akhir 1970-an, dua birokrasi negara yang paling kuat didominasi oleh lulusan *Toodai* yang mengisi 89% dari total jumlah karyawan Departemen Keuangan dan 76% di Departemen Luar Negeri.¹³ Selain itu, kualitas sekolah dasar dan menengah juga berbeda-beda di berbagai daerah, dan akses ke sekolah yang bermutu tergantung pada posisi sosial

¹⁰ John Lie, *Mutiernic Japan* (Harvard: Harvard College, 2001), hlm. 15.

¹¹ Bernard S. Silberman, *Ministers of modernization: elite mobility in the Meiji restoration, 1868- 1873* (Arizona: University of Arizona Press, 1964), hlm. 108.

¹² Ikuo Amano dan Makoto Asō, "Education and Japan's modernization", (*Japan Times*, 1983), hlm. 260-262.

¹³ Thomas P. Rohlen, *Japan's High Schools*. (Berkeley: University of California, Berkeley. Center for Japanese Studies, 1982), hlm. 91.

seseorang. Hiroshi Ishida membuat kesimpulan, "Distribusi yang tidak merata adalah hasil kerja yang terkait tidak hanya untuk berbagai tingkat pendidikan tetapi juga perbedaan jenis dan kualitas dalam tingkat pendidikan yang sama."¹⁴ Terutama di daerah-daerah miskin, gambaran sekolah menengah ditandai oleh kurangnya kehadiran siswa, kekerasan, prostitusi, dan penggunaan narkoba. Ini berbeda sama sekali dengan gambaran yang dominan di Amerika Serikat tentang keajaiban pendidikan Jepang)¹⁵

Dari paparan di atas tergambar bahwa masyarakat Jepang adalah masyarakat yang multikultur, bukan sebuah masyarakat yang secara alamiah homogen seperti yang disebarluaskan oleh para pemimpin elit politik dan pemerintahan di Jepang.

D. PEKERJA ASING

Pada tahun 1990-an, didukung oleh ekonomi gelembung (*bubble economy*), citra Jepang adalah kemakmuran. Kosakata kelas sosial semakin hilang, demikian pula dukungan terhadap partai-partai kiri sosialis. Kondisi ini membuat orang Jepang enggan pada pekerjaan yang kurang bergengsi. Para pekerja asing dibutuhkan terutama untuk bekerja pada bidang yang dijauhi oleh orang Jepang. Sebagian pekerja asing tentu ada yang datang dari golongan miskin dan putus asa. Namun, sebagian lain datang untuk belajar teknik elektro dan undang-undang keamanan, dan yang lainnya ingin bekerja pada sebuah perusahaan Jepang atau menikah dengan orang Jepang. Kefasihan berbahasa Inggris menunjukkan suatu pencapaian pendidikan tinggi dari orang Filipina dan Iran di Kotobuki dan di tempat lain. Pekerja konstruksi Bangladesh ada yang lulusan perguruan tinggi, pelayan bar yang bersala dari Filipina ada yang merupakan perawat profesional bersertifikat, atau penjual telepon yang berasal dari Iran adalah putra seorang dokter.¹⁶ Mereka juga

¹⁴ Hiroshi Ishida, Kuo-Hsien Su, Seymour Spilerman, *Models of career progression in Japanese and U.S. organizations*, (Columbia: Center on Japanese Economy and Business, Columbia Business School, 1998), hlm. 307.

¹⁵ Rohlen, *Japan's High Schools*, hlm. 294-301.

¹⁶ John Lie, *Mutiernic Japan*, hlm. 17-18.

datang dari beragam kultur dan agama seperti kultur Barat, Hindu, dan juga Muslim.

Di Jepang, kelas atas dan kelas bawah, berpendidikan perguruan tinggi dan buta huruf, semua masuk ke dalam kategori pekerja asing dengan asumsi bekerja di sektor kasar. Oleh karena itu, terjadi disparitas sosial, kelas menengah (dan kaya) orang Jepang *versus* kelas-bawah (dan miskin) para pekerja asing. Ironisnya, para politikus progresif adalah yang paling jelas mengkontraskan kelas sosial. Contohnya adalah seorang yang ditunjuk untuk memperjuangkan pekerja asing mengatakan bahwa mereka harus diizinkan untuk bekerja di Jepang karena mereka menyedihkan dan miskin. Seorang analisis Jepang yang progresif mengatakan bahwa para pekerja asing menekankan faktor struktural seperti kemiskinan mereka, bukan keinginan individu dan inisiatif sendiri.¹⁷ Liputan media menyoroti cerita sensasional penderitaan mereka, hanya menekankan eksploitasi dan penderitaan para pekerja asing, padahal tidak semua pekerja asing di Jepang seperti itu. Simpati yang tidak diinginkan dan praduga terselubung akan keunggulan bangsanya membuat pekerja asing membenci kesombongan orang Jepang. Pada bulan Oktober 1987, setelah kematian seorang mahasiswa Bangladesh yang kelaparan, aktivis Jepang meluncurkan sebuah gerakan untuk memberi makan mahasiswa asing, tetapi banyak mahasiswa asing menolak. Seorang pekerja Thailand mengatakan bahwa ia “merasa kasihan pada orang Jepang karena tidak ada negara asing di mana mereka bisa mendapat 10 atau 20 kali upah seperti di Jepang.” Kontras antara orang Jepang kelas menengah dan pekerja asing kelas bawah adalah keyakinan yang tersebar luas dalam hal kemewahan Jepang dan kemiskinan Dunia Ketiga. Dengan mengabaikan ketidaksetaraan di negara sendiri, banyak orang Jepang menonjolkan ketidaksetaraan itu. Kerangka nasionalis dan esensialis banyak menyebabkan orang Jepang mengabaikan ketimpangan di dalam negeri. Motoyama Yoshihiko (1991), salah satu ekonom Jepang terkemuka, memulai survei tentang negara-negara berkembang dengan sebuah bab berjudul “putus asa kemiskinan negara-negara berkembang,” tetapi ia tidak menyebutkan ketimpangan yang signifikan dalam suatu negara berkembang atau di antara negara-negara berkembang. Hal ini

¹⁷ *Ibid.*

mencerminkan pandangan luas di Jepang mengenai Dunia Ketiga secara sederhana, "sangat miskin." Banyak pekerja asing relatif terdidik, tetapi mereka mengakui bahwa mereka berasal dari negara-negara miskin dan mencari pekerjaan di Jepang yang makmur .

Jepang sebagai sebuah negara adidaya ekonomi dengan infrastruktur media yang canggih, tidaklah kebal terhadap kecenderungan arus global dalam hal migrasi. Jepang memang pernah terasing dari kontak dengan negara luar pada masa *sakoku* sampai kemudian kedatangan Commodore Perry pada tahun 1853, ketika itu para pemimpin Jepang dipaksa untuk memutuskan apakah akan membuka negara (*kaikoku*) atau tetap tertutup (*sakoku*). Pada akhir abad keduapuluh, Jepang juga menghadapi masalah yang mirip dengan hal ini,¹⁸ yaitu apakah akan menerima atau menolak pekerja imigran dari negara lain yang masuk ke Jepang. Perdebatan tentang hal ini melahirkan dua kelompok yang berseberangan yaitu kelompok *sakoku* dan kelompok *kaikoku*.

E. PERDEBATAN PENERIMAAN PEKERJA ASING

1. Faksi *Sakoku*

Faksi *sakoku* berpendapat bahwa para pekerja asing akan merusak keunikan Jepang. Yano Taro, misalnya, menulis bahwa sistem kekaisaran dan pandangan dunia terhadap orang Jepang yang unik harus dilindungi dari orang asing. Demikian pula, Kanji Nishio (1988) memperingatkan bahwa penduduk non-Jepang akan menyebabkan ketidakteraturan sosial sebagaimana yang terjadi di negara-negara lain. Ia juga mengatakan bahwa imigran dan anak-anaknya akan mengancam fungsi sekolah dan lembaga-lembaga lainnya yang telah berjalan dengan baik dan dengan demikian akan melemahkan kohesi sosial dan ketertiban. Nishio juga menyimpulkan, "Ini (masalah pekerja asing) tidak selalu masalah ekonomi. Terus terang ini adalah masalah 'pertahanan budaya'".¹⁹

¹⁸ Tatsumaro Tezuka, *Twenty-five tales in memory of Tokyo's foreigners*, (Tokyo: Tokyo Metropolitan Govt., 1989), hlm. 9-21.

¹⁹ Lie, *Multietnic Japan*, hlm. 15.

2. Faksi *Kaikoku*

Faksi *kaikoku* mengizinkan masuknya pekerja asing dari negara miskin dan membiarkan mereka mencari uang di Jepang sehingga memenuhi kewajiban Jepang sebagai negara kaya. Enuma Yasuaki (1988) berpendapat bahwa menerima imigran tidak hanya membuat Jepang dianggap sebagai bangsa yang baik di mata masyarakat internasional, tetapi juga akan membuka semangat ketertutupan Jepang.²⁰ Para pendukung kebijakan *sakoku* menekankan pada konsekuensi- konsekuensi sosial, sedangkan pendukung *kaikoku* menekankan hak asasi manusia dan tanggung jawab Jepang terhadap dunia internasional. Alasan utama menentang imigrasi adalah ketakutan akan tindakan kriminal, sedangkan yang mendukung beralasan bahwa adanya kebutuhan akan pekerja migran untuk pekerjaan yang dijaui orang Jepang. Kementerian nasional memiliki pandangan yang beragam dan beberapa pemerintah daerah aktif menganjurkan imigrasi terbuka.²¹

Seiring perjalanan waktu, respon masyarakat Jepang terhadap pekerja migran dari Asia, baik Muslim maupun non-Muslim, menjadi lebih positif. Survei surat kabar *Mainichi* pada bulan Desember 1988 melaporkan bahwa 45% "mendukung" dan 48% "menentang" masuknya pekerja asing Asia dengan kultur Muslim, Hindu, atau yang lain. Namun, pada bulan Januari 1990, "pendukung" meningkat menjadi 51 persen, sementara yang "menentang" menurun menjadi 44 persen. Pada tahun 1993 suara yang dominan adalah menerima pekerja asing. Sebagaimana pendapat para sarjana di akhir tahun 1980-an, masuknya pekerja migran merupakan hal yang tak dapat dihindari. Ekonom Yasuo Kuwahara menyatakan bahwa debat politik *kaikoku* dan *sakoku* tidak ada artinya karena tidak mencerminkan adanya kebutuhan riil industri Jepang.²²

Jepang tidak bisa mengelak dari para pekerja imigran yang datang ke negeri itu karena mereka membutuhkan para pekerja imigran akibat penurunan jumlah tenaga kerja dalam negeri yang diakibatkan oleh demografi Jepang yang berkurang. Tingkat kelahiran

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*, hlm. 16.

²² *Ibid.*, hlm. 17.

anak semakin menurun dan semakin menuanya masyarakat Jepang, serta meningkatnya sektor jasa dengan upah rendah.²³

Menurut Douglass dan Roberts, faktor internal paling menonjol yang mendasari permintaan tenaga kerja asing di Jepang adalah demografi Jepang (karena penduduknya semakin menurun jumlahnya) dan keberhasilan ekonomi Jepang. Keberhasilan ekonomi Jepang membawa Jepang menjadi negara terkaya di dunia. Dari negara yang mengalami kehancuran pada akhir era Perang Dunia II, Jepang telah berhasil menjadi negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia, dan membuat Jepang berada dalam posisi kekurangan tenaga kerja di bidang pekerjaan dengan upah rendah. Dalam proses kemajuan ekonomi, penduduk lebih banyak menjadi sangat urban – jumlah anggota keluarga menurun dan tingkat kelahiran amat rendah. Pekerjaan dengan upah rendah tidak dapat terpenuhi oleh tenaga kerja di dalam negeri; jumlah tenaga kerja yang terancam akibat penurunan kelahiran ini menjadi masalah besar bagi Jepang. Pada saat yang bersamaan, Jepang menghadapi beban ekonomi dan kesejahteraan warganya akibat penduduknya yang mengalami penuaan sehingga membutuhkan secara besar-besaran tenaga kerja dalam bidang pelayanan kesehatan dan tenaga medis dengan upah rendah. Semua faktor tersebut membuat permintaan untuk tenaga kerja terus meningkat dan menciptakan peluang bagi tenaga kerja asing untuk bekerja di Jepang.

Douglass dan Roberts mengatakan bahwa terdapat empat faktor eksternal yang membuat tingkat migrasi ke Jepang menjadi tinggi. Faktor pertama adalah kesenjangan pendapatan antara Jepang dan negara lainnya di dunia, termasuk dengan negara-negara berpenduduk Muslim di Asia dan Afrika. Kesenjangan ini begitu besar sehingga imigran dengan gelar sarjana bersedia bekerja di bidang pekerjaan yang paling rendah di Jepang, rela hidup dalam kemiskinan dan berada dalam tekanan emosional karena terkucilkan di masyarakat demi keluarganya di negeri asal. Mereka tidak dapat mendapatkan itu jika bekerja di negaranya sendiri.

Faktor kedua adalah kedatangan imigran ke Jepang semakin dimungkinkan akibat banyaknya penyalur tenaga kerja baik para

²³ Mike Douglass dan Glenda Susan Roberts, *Japan and Global Migration: Foreign Workers and the Advent of Multicultural Society* (Hawaii: University of Hawaii Press, 2000), hlm. 20.

perekrut profesional, penyelundup imigran, maupun pemerintah Jepang sendiri. Pemerintah Jepang merupakan penerima uang terbesar dari upah dan pendapatan imigran melalui perjanjian kontrak kerja dan kontrol atas penerbitan visa dan dokumen lainnya. Oleh karena itu, imigrasi bukan hanya masalah individu yang bergerak atas kemauan sendiri, tetapi juga ditopang oleh para perekrut yang terorganisasi termasuk negara. Laporan pemerintah Jepang menemukan bahwa perekrutan pekerja asing tidak berdokumen semakin terorganisir dan canggih, dengan pertumbuhan keterlibatan sindikat kejahatan yang berbasis di Hongkong, Taiwan, Thailand, dan Filipina, serta kelompok gangster *yakuza* di Jepang. Dalam konteks ini, terdapat kesenjangan antara jumlah imigran ilegal dengan kapasitas penegakan hukum.

Faktor ketiga adalah kemajuan revolusioner transportasi udara dan ketersediaan informasi yang meningkatkan akses dalam migrasi, dan pengetahuan tentang negara tujuan yang berpotensi membuat orang-orang dari pedesaan miskin "nekad" melakukan perjalanan ke luar negeri dalam jumlah besar melalui para perekrut profesional. Jaringan di antara kelompok migran dibuat untuk berbagi informasi dan keterampilan tentang cara agar dapat masuk ke Jepang melalui berbagai saluran yang semakin canggih.

Faktor keempat adalah kelompok masyarakat dan organisasi non-pemerintah (LSM) yang menjadi pendukung para migran asing ini agar dapat masuk ke Jepang. Mereka memperjuangkan keadilan sosial dan hak asasi manusia bagi orang asing yang berada di Jepang dengan menentang kebijakan imigrasi, prosedur hukum, dan praktik kepolisian yang membedakan orang asing dengan penduduk pribumi, dan berbagai bentuk diskriminasi lainnya terhadap imigran yang membuat mereka tetap bekerja dalam upah rendah yang tidak terjamin keamanannya dan berisiko tinggi.

Perusahaan-perusahaan industri berusaha keras mengurangi ketergantungan pada tenaga manusia dan menggantinya dengan robot, tetapi pada sektor pelayanan kesehatan dan perawatan lansia hal ini tidak dapat dilakukan. Pada awalnya, Jepang membuka peluang pekerja asing hanya untuk mereka yang berkemampuan khusus, tetapi kini sebagian besar tenaga kerja asing bekerja di industri tekstil dan pembuatan baju, pembuatan mesin dan logam, pertanian, perikanan, dan konstruksi bangunan.

Oleh karena itu, bagaimana pun dunia industri Jepang tetap membutuhkan pekerja asing dengan upah murah untuk bekerja di sektor-sektor yang mulai ditinggalkan atau dihindari oleh pekerja Jepang, yaitu sektor pekerjaan yang bersifat 3K: *Kitanai* (kotor), *Kiken* (berbahaya), dan *Kitsui* (susah) di atas.

F. Kesimpulan

Perdebatan secara nasional di Jepang tentang penerimaan pekerja asing terutama yang datang dari Dunia Islam di Asia dan Afrika melahirkan dua kelompok yang berseberangan yaitu kelompok *sakoku* (yang menolak pekerja asing) dan *kaikoku* (yang menerima pekerja asing). Demi kontrol dan kekuasaan, para pemimpin Jepang menyebarkan konsepsi bahwa masyarakat Jepang adalah masyarakat yang homogen atau monokultur. Namun, dewasa ini konsepsi homogenitas dihadapkan pada konsepsi multikulturalisme yang disebarluaskan dalam masyarakat Jepang dengan tujuan untuk membantu kesepahaman masyarakat Jepang dalam penerimaan pekerja asing yang semakin dibutuhkan. Bagaimana pun, industri Jepang tetap membutuhkan pekerja asing dengan upah murah untuk bekerja di sektor-sektor yang mulai ditinggalkan atau dihindari pekerja Jepang yaitu sektor pekerjaan yang bersifat 3K: *Kitanai* (kotor), *Kiken* (berbahaya), dan *Kitsui* (susah). Masyarakat Jepang secara luas masih memiliki pandangan monokulturalisme. Untuk mempermudah penerimaan masyarakat Jepang terhadap pekerja imigran asing yang semakin dibutuhkan, sebagian masyarakat Jepang mempromosikan pentingnya multikulturalisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Amano, Ikuo dan Makoto Asō. "Education and Japan's modernization". Dalam *Japan Times*, 1983.
- Burgess, Chris. "Jepang yang multikultur? Wacana dan Mitos Homogenitas", terj. Dipo Siahaan, dkk. dalam *The Asia-Pacific Journal: Japan Focus* (2007). Diakses pada tanggal 23 April 2011 dari <http://japanfocus.org/data/indo.multiculturaljapan.pdf>.
- Burgess, Chris. "The 'Illusion' of Homogeneous Japan and National Character: Discourse as a Tool to Transcend the 'Myth' vs. 'Reality' Binary". Diakses pada tanggal 23 April 2011 dari <http://japanfocus.org/-Chris-Burgess/3310>.
- Denoon, Donald dan Mark Hudson (ed.), *Multicultural Japan Palaeolithic to Postmodern*. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
- Douglass, Mike dan Glenda Susan Roberts. *Japan and Global Migration: Foreign Workers and the Advent of Multicultural Society*. Hawaii: University of Hawaii Press, 2000.
- Ishida, Hiroshi, Kuo-Hsien Su, Seymour Spilerman. *Models of career progression in Japanese and U.S. organizations*. Columbia: Center on Japanese Economy and Business, Columbia Business School, 1998.
- Lie, John. *Multiethnic Japan*. Harvard: Harvard College, 2001.
- Mouer, Ross, dan Yoshio Sugimoto. *Images of Japanese Society: A Study on the Structure of Social Reality*. London and New York: Kegan Paul International, 1986.
- Nakane, Chie. *Japanese Society*. California: University of California Press, 1970.

Edy Hariyadi

Pusat Bahasa Diknas RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Offline Versi 1.1.*

Rohlen, Thomas P. *Japan's high schools.* Berkeley: University of California, Berkeley, Center for Japanese Studies, 1982.

Silberman, Bernard S. *Ministers of modernization: elite mobility in the Meiji restoration, 1868- 1873.* Arizona: University of Arizona Press, 1964.

Sugimoto, Yoshio. *An Introduction to Japanese Society Second edition.* New York: Cambridge University Press, 2010.

Tezuka, Tatsumaro. *Twenty-five tales in memory of Tokyo's foreigners.* Tokyo: Tokyo Metropolitan Govt., 1989.